

BAB II

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

A. Implementasi Nilai-nilai Anti korupsi

1. Pengertian Implementasi.

Implementasi menurut Sulchan Yasin (1997:221) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris "*to implement*" artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan, implementasi merupakan suatu proses ide, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Dalam Mulyasa (2003: 93) implementasi adalah penerapan sesuatu yang memberikan dampak dan efek, menurut Purwanto dan Sulistyastuti (1991: 21) implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Pendapat Cleaves yang dikutip (dalam Wahab 2008: 187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup "Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik". Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya

secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Menurut Mazmanian dan Sebastiar (dalam Wahab, 2008: 68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin Usman, 2002:70).

Dari berbagai defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dengan kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Pengertian Nilai.

Manusia dalam kehidupan akan selalu berhubungan dengan nilai. Misalnya yaitu ketika seseorang mengatakan orang lain baik atau buruk, hal ini menandakan adanya suatu penilaian terhadap suatu objek, baik dan buruk itu adalah contoh nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia.

Menurut Milton Rekeach dan James Bank, nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, Chabib Thoha, Kapita Selektta Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), W.J.S. Purwadaminta, Kamus Umum bahasa Indonesia (Jakarta; Balai Pustaka, 1999), Mansur Isna, Diskursus Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), dalam mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau memiliki dan dipercayai. Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir berpendapat bahwa dalam strategi penanaman nilai itu mengutarakan nilai sebagai afektif diajarkan melalui pemahaman

koqnitif. Menurut Chabib Thoha nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (Sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia yang meyakini). Jadi nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku. Bahasa Inggris mengartikan nilai sebagai value yaitu suatu harga, penghargaan jiwa, atau taksiran. Maksudnya yaitu harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang (Muchson 2000: 16). Nilai sendiri memiliki arti sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan (Purwadarminta, 2002: 677). Nilai itu praktis dan efektif dalam wa dan tindakan manusia dan melembaga secara obyektif di dalam masyarakat (Muhaimin, 1993:110).

Pengertian nilai selanjutnya dipertegas lagi oleh (Noor Salimi, 2008:202). Nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterkaitan maupun perilaku. Oleh karena itu, sistem nilai dapat merupakan standard umum yang diyakini, diserapi dari keadaan obyektif maupun diangkat dari keyakinan, sentimen (perasaan umum) maupun identitas yang diberikan atau diwahyukan oleh Allah SWT, yang pada gilirannya merupakan sentimen (perasaan umum), kejadian umum, identitas umum yang oleh karenanya menjadi syariat umum.

Nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia yang meyakini). Jadi nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku (Chabib, 1996: 61). Nilai adalah sesuatu yang abstrak dan ideal. Nilai bukan benda konkret, bukan fakta yang tidak hanya sekedar penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, yang disenangi dan yang tidak disenangi. Nilai itu terletak antara hubungan subjek penilai dengan objek (Gazalba, 2008:17). Nilai adalah yang memberikan makna hidup, yang memberi pada hidup ini titik tolak, isi, dan tujuan. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang

mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut tindakan. Nilai dapat dianggap keharusan, suatu cita yang menjadi dasar bagi keputusan yang diambil seseorang. Nilai-nilai itu merupakan bagian kenyataan yang tidak dapat dipisahkan atau diabaikan. Setiap orang yang bertingkah laku sesuai dengan seperangkat nilai, baik nilai yang sudah merupakan hasil pemikiran yang tertulis maupun yang belum. (Sjarkawi, 2005: 29). Beberapa pendapat para ahli diatas dapat di simpulkan bahwa nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Esensi belum berarti sebelum dibutuhkan oleh manusia,tetapi tidak berarti adanya esensi karena adanya manusia yang membutuhkan. Hanya saja kebermaknaan esensi tersebut semakin meningkat sesuai dengan peningkatan daya tangkap pemaknaan manusia itu sendiri. Jadi nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subyek menyangkut segala sesuatu baik atau yang buruk sebagai abstraksi,pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat.

3. Pengertian Anti Korupsi.

Pengertian antikorupsi juga dipertegas oleh (Nurdin, 2004:178) bahwa antikorupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi. Anti korupsi merupakan sikap yang dapat mencegah (upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindak korupsi) dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Sedangkan menurut (Maheka,2006:31). Antikorupsi adalah kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan sistem (hukum dankelembagaan) dan perbaikan manusianya.

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa latin, yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa inggris menjadi

corruption atau *corruptie*. Asumsi kuat yang menyatakan bahwa dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa indonesia, yaitu korupsi. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan,keburukan,kebejatan,ketidak jujur, dapat disuap,tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan kata-kata atau ucapan yang memfitnah (Hamzah, 2005:4).

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan tindakan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat (Nurdin,2014:178). Selanjutnya pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi, tetapi terus memahami nilai-nilai, menghayati nilai-nilai dan mengamalkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kebiasaan hidup sehari-hari. Pendidikan antikorupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk memperkenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik.

4. Nilai-Nilai Anti Korupsi.

Menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dari dini sangatlah penting. Terutama disampaikan disekolah dan diterapkan pada para pelajar di masa mendatang. Demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang bebas korupsi, menangkap dan memenjarakan koruptor. Oleh karena itu, sikap antikorupsi harus ditanamkan pada generasi muda sebagai langkah preventif. Mengapa nilai-nilai antikorupsi perlu disemaikan ke dalam jiwa dan roh generasi muda? Ada keyakinan luas bahwa generasi saat ini dilahirkan, dibesarkan, dan berkembang di dalam sistem dan budaya yang korupsi. Akibatnya, sikap generasi sekarang terhadap korupsi menjadi toleran. Mereka mengkritik dan mencela tindakan korupsi dipermukaan, tetapi hati mereka tidak memiliki keberanian untuk berurusan dengan koruptor, sehingga mereka cenderung membiarkan dan memaafkan mereka. Korupsi tidak akan pernah bisa diberantas jika sudah begini. Oleh sebab itu, generasi penerus atau yang sekarang disebut sebagai generasi muda harus didorong untuk mengembangkan pola pikir antikorupsi yang kuat.

Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima korupsi ke sikap tegas menolak korupsi tidak akan pernah terwujud jika generasi sekarang yang masih memiliki hati nurani tidak mau dan mampu membina generasi muda untuk mengevaluasi dan memperbarui nilai-nilai yang diwarisi dari generasi terdahulu dan sekarang sesuai dengan tuntutan, perkembangan dan kebutuhan bangsa. Nilai yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai atau sesuatu yang baik (Bertens, 2001: 139).

Identifikasi nilai-nilai anti korupsi amatlah perlu guna untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang harus dikembangkan dalam diri peserta didik supaya dapat menumbuhkembangkan sikap dan perilaku yang anti korupsi. Sehingga nilai-nilai ini dapat melekat dalam jiwa dan setiap tindakan yang ia lakukan dan tetap pada koridor yang baik dan benar.

Berdasarkan hasil identifikasi dan kajian menurut Amirulloh Syarbini Muhammad Arbain, 2014:69, ada beberapa nilai-nilai yang akan dibahas dalam pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan nilai-nilai anti korupsi adalah iyalah sebagai berikut :

a) Jujur

Amirulloh Syarbini Muhammad Arbain (2014:69) Kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan peserta didik. Tanpa sifat jujur seseorang tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Nilai kejujuran di sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai.

Kejujuran dimulai dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, kelas, sekolah, dan rumah sendiri. Orang jujur, seperti bola salju, akan terus bergulir untuk membangun keluarga yang jujur. Keluarga yang jujur terus tumbuh, membentuk lingkungan hidup yang paling jujur. Lingkungan yang jujur tanpa pamrih pada

akhirnya akan menghasilkan masyarakat yang jujur tanpa pamrih, dan masyarakat yang tidak pemaaf tersebut pada akhirnya akan mampu membangun karakter bangsa yang tidak kenal ampun. Finlandia adalah contoh dalam hal ini. Berkata dan berbuat benar, jujur, hormat, terbuka, menghargai diri sendiri, dapat dipercaya, dan memiliki niat yang lurus terhadap setiap tindakan adalah ungkapan-ungkapan penting dalam kejujuran (Bahri, 2008: 15; Tamrin, 2008: 16).

b) Tanggung Jawab

Amirulloh Syarbini Muhammad Arbain (2014:69) Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran dan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Tanggung jawab merupakan nilai penting yang harus dihayati oleh peserta didik. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain Dapat diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, Mengerjakan tugas sekolah dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan.

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan di dalam pribadi setiap manusia, supaya menjadi manusia yang memiliki kepribadian baik. Mustari (2011: 21) berpendapat bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara, dan Tuhan. Sependapat dengan Mustari, Daryanto (2013: 142) menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia

lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

c) Disiplin

Amirulloh Syarbini Muhammad Arbain (2014:69) Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Dalam kehidupan ini kedisiplinan amatlah penting untuk kesuksesan seseorang, baik disiplin waktu maupun disiplin dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Hidup disiplin bagi peserta didik adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik sekolah maupun kehidupan sosial. Manfaat dari hidup disiplin adalah peserta didik dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Dengan semangat disiplin akan membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh peserta didik agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah, mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan.

Tamrin (2008: 17) Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer dengan hidup di barak bagai robot, tetapi hidup disiplin dipahami siswa atau mahasiswa dengan cara mengatur dan mengelola waktu sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Manfaat hidup disiplin adalah siswa atau mahasiswa dapat mencapai tujuan atau mengejar kepentingan secara lebih efisien dan efektif. Kata kunci kedisiplinan adalah komitmen, tepat waktu, prioritas, perencanaan, taat, fokus, tekun, dan konsisten.

d) Sederhana

Amirulloh Syarbini Muhammad Arbain (2014:69) Gaya hidup peserta didik merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan

masyarakat sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak peserta didik mengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap peserta didik dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai kemampuannya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hidup sederhana, peserta didik dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana dapat mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan sikap-sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan, Nilai kesederhanaan dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah, misalnya hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan, dan lain sebagainya.

Kesederhanaan berasal dari kata sederhana, artinya bersahaja, tidak berlebih-lebihan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 1008). Kesederhanaan adalah sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tetapi lebih mementingkan tujuan dan manfaatnya. Hidup sederhana berarti hidup bersahaja dan tidak berlebih-lebihan yang didasari oleh suatu sikap mental rendah hati. Kata kunci sederhana adalah bersahaja, tidak berlebihan, sesuai kebutuhan, apa adanya, dan rendah hati (Tamrin, 2008: 19).

e) Mandiri

Amirulloh Syarbini Muhammad Arbain (2014:69) Mandiri dapat diartikan sebagai proses pendewasaan diri yaitu tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Bagi peserta didik, hal ini amatlah penting untuk masa depannya di mana peserta didik tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Peserta didik dituntut untuk

mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri. Untuk melihat kemandirian peserta didik, nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas sekolah secara mandiri, dan menyelenggarakan kegiatan siswa secara swadana.

Mandiri berarti dapat berdiri diatas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang dapat mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Kemandirian bukan merupakan pembawaan yang melekat pada diri individu sejak lahir. Perkembangan kemandirian seseorang dipengaruhi oleh berbagai stimulasi yang datang dari lingkungan selain dari potensi keturunan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian seorang remaja menurut Ali dan Asrori: Gen atau keturunan orang tua; Pola asuh orang tua; Sistem pendidikan di sekolah; Sistem kehidupan di masyarakat (Muhammad Ali, 2006:110).

f) Kerja Keras

Amirulloh Syarbini Muhammad Arbain (2014:69) bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kata "kemauan" terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Kerja keras penting sekali bagi peserta didik, karena kemauan peserta didik harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Seseorang yang penuh dengan harapan dan percaya

diri, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Di sekolah peserta didik dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan. Nilai kerja keras dapat diwujudkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam melakukan sesuatu menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan sungguh-sungguh.

Kerja keras merupakan salah satu dari delapan anak tangga untuk mencapai keberhasilan. Anak tangga lainnya adalah mencapai tujuan dengan menggunakan orang lain, penampilan yang baik, keyakinan diri, membuat keputusan, pendidikan, dorongan ambisi, dan pandai berkomunikasi. Karena pentingnya kerja keras, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW, secara simbolik memberi hadiah kapak dan tali kepada seorang laki-laki agar dapat digunakan untuk bekerja (Alma 2008: 106).

g) Adil

Amirulloh Syarbini Muhammad Arbain (2014:69) Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Menumbuhkembangkan sikap adil dalam diri peserta didik perlu sekali dibina sejak masa sekolahnya agar peserta didik dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar, sehingga dalam kehidupan sehari-hari nilai keadilan ini dapat menjadi pijakan utama dalam setiap tindakannya di sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Nilai keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus kepada kawan yang berprestasi, memberikan saran perbaikan dan semangat pada kawan yang tidak berprestasi, tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosialnya. Keadilan berasal dari kata

adil, artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; sepatutnya, tidak sewenang-wenang (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 8). Kata keadilan juga memiliki makna yang beragam. Cephalus, seorang hartawan terkemuka Athena, memaknai keadilan sebagai bersikap fair dan jujur dalam membuat kesepakatan (Rasuanto, 2005: 8).

h) Berani

Amirulloh Syarbini Muhammad Arbain (2014:69) Keberanian amat perlu untuk menunjang kesuksesan peserta didik. Di mana peserta didik harus berani bersikap jika melihat suatu yang salah dan melanggar aturan, menegur teman yang salah, bertanggung jawab ketika salah, serta dalam proses pembelajaran, peserta didik harus berani untuk bertanya tentang apa yang tidak diketahuinya. Nilai keberanian ini bukan semata-mata untuk belajar bertanggung jawab. Keberanian berasal dari kata berani, yang artinya mempunyai hat yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 138). Keberanian adalah tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Orang yang berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, merupakan agen penting dalam mengembangkan nilai-nilai antikorupsi. Mengatakan keberanian adalah pahit dan buahnya adalah manis, yaitu terwujudnya pribadi dan masyarakat yang baik dan benar. Kata kunci keberanian adalah mantap, tegar, hadapi, tekak, semangat, target, fokus, perjuangan, percaya diri, tak gentar, tidak takut, dan pantang mundur (Bahri, 2008: 17; Tamrin, 2008: 23).

i) Peduli

Amirulloh Syarbini Muhammad Arbain (2014:69) Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian amat penting bagi seorang peserta didik. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang peserta didik perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan sekolah maupun masyarakatnya. Rasa kepedulian peserta didik harus mulai ditumbuhkan sejak berada di sekolah. Peserta didik dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Peserta didik juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nilai kepedulian ini dapat diwujudkan dalam bentuk usaha memantau jalannya proses pembelajaran, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan peduli terhadap teman yang tertimpa musibah serta peduli terhadap segala tindakan yang menyimpang dalam sekolah, seperti, mencontek, mencuri, berkelahi bahkan mengkorup keuangan sekolah. Sehingga, upaya penanaman sikap anti korupsi di lembaga pendidikan sebagai Salah satu solusi untuk dapat membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya.

Kepedulian berasal dari kata “peduli”, artinya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:841). Kepedulian bermakna berperilaku dan memperlakukan orang lain dan lingkungan sekitarnya, sehingga bermanfaat bagi semua pihak. Peduli merupakan sifat yang dapat membuat segala kesulitan dapat dihadapi, segala keadaan dapat ditanggung bersama, dan keterbatasan pun dapat dicarikan solusinya. Kata kunci peduli adalah memahami, menghargai, mendukung, menghormati, dan menolong (Bahri, 2008: 17). Wujud dari nilai kepedulian dalam kehidupan di sekolah dan kampus diantaranya adalah mematuhi peraturan sekolah dan tata tertib kampus, membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi teman, merawat tanaman di sekitar sekolah dan kampus, tidak merusak fasilitas umum, serta merawat dan menjaga barang-barang milik umum.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi.

1. Faktor Pendukung Dalam Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi.

Faktor pendukung adalah merupakan faktor yang mendukung atau mendorong, mengajak dan bersifat ikut serta dalam dukungan suatu kegiatan. Menurut Masitoh, 2011: 108 terdapat beberapa faktor pendukung dalam implementasi nilai-nilai anti korupsi, diantaranya sebagai berikut:

a. Komitmen Guru

Komitmen yang luar biasa dari guru yang merupakan pendidik dengan peran yang penting dalam menerapkan pembelajaran implementasi nilai-nilai anti korupsi pada mata pelajaran PPKn, dalam menanamkan rasa dan tanggung jawab terhadap kewajiban untuk tidak menyimpang dari peraturan sekolah.

b. Komitmen Kepala Sekolah

Dalam menjalankan suatu keputusan penerapan nilai-nilai anti korupsi tidak hanya perlu komitmen dari guru saja untuk menanamkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan peraturan yang sudah disepakati bersama di lingkungan sekolah sehingga tidak terjadinya suatu pelanggaran korupsi, peranan komitmen Kepala Sekolah juga sangat berpengaruh pada suksesnya suatu pemahaman akan nilai-nilai anti korupsi sehingga terciptanya rasa tanggung jawab yang besar akan kewajiban baik sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, maupun guru yang mengajar serta siswa/siswi di lingkungan sekolah tersebut.

c. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi Kurikulum secara berkala akan memberikan informasi penting bagi perancang dan pengembang kurikulum menyangkut kelemahan dan kekuatan sebuah kurikulum yang telah dirancang dan diimplementasikan akan berguna untuk pengembangan dan perubahan

kurikulum di masa yang akan datang sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan pendidikan Indonesia dalam menciptakan manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing dalam persaingan global.

d. Teladan yang baik

Menjadi teladan yang baik bagi siswa dengan konsistensi mengajarkan nilai yang berlawanan dengan perilaku korupsi, dan tentunya dukungan komitmen kepala sekolah dalam hal pengambilan kebijakan tertinggi untuk mendukung usaha bersama dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi baik dalam pembelajaran maupun di lingkungan sekolah.

2. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi.

Penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan akan terjadinya sesuatu. Adapun faktor penghambat menurut Kristiono (2018:9), yaitu :

1) Kesadaran diri

Dalam program pendidikan nilai-nilai anti korupsi tidak lepas dengan hambatan dalam mengimplementasikannya salah satu hambatan itu ada pada diri pribadi atas kesadaran diri untuk melakukan tindakan kongkrit pada pelaksanaannya, hambatan tersebut sangatlah berpengaruh pada pendidikan akan nilai-nilai anti korupsi, tidak adanya kesadaran diri untuk melakukan hal-hal yang dapat menghindari tindakan korupsi sehingga terjadinya suatu pelanggaran korupsi baik korupsi, uang, waktu dan tanggung jawab sebagai siswa/siswi maupun guru.

2) Kurangnya Pemahaman dan persamaan persepsi.

Kurangnya pemahaman dan persamaan persepsi mengenai nilai-nilai anti korupsi yang akan di tanamkan pada diri pribadi, tidak berkesinambungan dengan pendidikan anti korupsi.

3) Beragamnya sumber informasi yang di dapatkan media atau berita.

Beragamnya sumber informasi yang telah didapatkan melalui media atau berita yang tidak independen yang menimbulkan

kebingungan dalam menjelaskan kegiatan anti korupsi yang uptodate di butuhkan pembagian dan pengelolaan jam pelajaran yang baik.

- 4) Budaya anti korupsi yang belum tumbuh dengan baik dalam jiwa sekolah

Di dalam budaya antikorupsi yang belum tumbuh dengan baik dalam jiwa sekolah akan membawa pengaruh terhadap perilaku yang buruk atau tidak baik, perlunya kesadaran diri dalam diri sendiri tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang lain. Perilaku tersebut harus tumbuh sejak dini, secara berkelanjutan, dalam budaya anti korupsi yang belum tumbuh dengan baik di dalam jiwa sekolah dipengaruhi oleh kebiasaan yang tidak baik dan bertentangan dengan peraturan sekolah.

3. Cara Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi

Dalam mengatasi faktor penghambat implementasi nilai-nilai anti korupsi, pentingnya bagi guru untuk menerapkan teladan yang baik, motivasi, inspirasi sehingga peserta didik dapat mendapatkan pandangan terhadap implementasi nilai-nilai anti korupsi, didalam lingkungan sekolah, penjelasan cara mengatasi faktor penghambat nilai-nilai anti korupsi sebagai berikut :

- 1) Guru memberikan teladan

Guru memberikan teladan yaitu guru diharapkan mampu memberikan contoh yang baik kepada peserta didik agar dapat di contoh oleh peserta didik. Selain itu, guru juga tidak akan bosan untuk mengingatkan peserta didik untuk berperilaku baik pada kebiasaan diri sehari-hari sehingga tertanam karakter yang baik pada peserta didik. Peran guru sebagai teladan yang baik juga tertuang pada dalam rencana perangkat pembelajaran seperti membiasakan diri untuk berdoa sebelum

m belajar hingga akhir pembelajaran peserta didik juga disisipkan pendidikan karakter seperti rasa syukur. Menurut (Hamalik, 2008 :9).

2) Guru memberikan motivasi

Guru memberikan motivasi kepada siswa sehingga guru mampu menekankan pada setiap masuk pembelajaran peserta didik diberikan motivasi terlebih dahulu. Selain itu, guru sebagai motivasi yang dilakukan adalah pada setiap paginya ketika peserta didik akan memasuki gerbang sekolah ada guru piket yang bertugas di gerbang yang menyambut peserta didik untuk memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik. Menurut (Wiyani, 2012:85-87).

3) Guru memberikan inspirasi

Guru memberikan inspirasi harus mampu menjadi inspirasi bagi peserta didiknya dengan apa guru miliki atau pun bisa dengan menggunakan inspirasi dari tokoh-tokoh teladan sehingga dapat membangkitkan semangat peserta didik untuk meraih prestasi dan berkarater baik. Menurut (Wiyani 2012:85-87).

C. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Penanaman nilai-nilai anti korupsi merupakan pendorong sikap anti dengan budaya korupsi, melalui pendidikan kewarganegaraan merupakan korelasi mata pelajaran yang terkait, dengan kejujuran, keadilan, kedisiplinan, kesederhanaan, tanggung jawab, keberanian, kerja keras, diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan bangsa terkait dengan korupsi.

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah nama salah satu mata pelajaran sebagai muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan termasuk cakupan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, dimaksudkan

untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Selain itu perlu pula ditanamkan kesadaran wawasan kebangsaan, jiwa patriotisme dan demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (Kemendiknas, 2011: 1-2) Amerika Serikat,2000: 17).

Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses yang akan berpengaruh positif untuk membentuk warga negara dalam peranannya di masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan membantu generasi muda untuk memahami cita-cita nasional, macam-macam hak kemerdekaan warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Pendidikan kewarganegaraan juga dipertegas lagi oleh (Jakni,2014:1) pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat kewarganegaraan suatu negara hak dan kewajiban warga negara oleh warga negara. Sedangkan warga negara dapat diartikan sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah negara dan negara adalah organisasi yang ada dan terpelihara dan interaksi-interaksi warga negara dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya,dimana pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari orang lain Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses pembinaan peranan warga negara untuk bisa menjadi menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara sebagai aspek pendidikan politik (Cholisin, 2000: 19).

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Adanya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan bagi bangsa Indonesia akan senantiasa diupayakan untuk membentuk manusia indonesia seutuhnya, sebagaimana diupayakan dan amanatkan UUD 1945, yakni sebagai manusia indonesia yang religius, berkemanusiaan dan berkeadaban, yang memiliki nasionalisme, yang cerdas, yang berkerakyatan, dan adil terhadap lingkungan sosialnya.

Tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan (pasal 2 ayat 3 UU No.20 Tahun 2003) adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta tanggung jawab. Secara umum dikatakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*) (Azis Wahab dan Sapriya, 2011: 311). Menurut (Dimon dan Pflieger, 2000: 1.15) warga negara yang baik memiliki ciri-ciri setia, pemikir, menerapkan hubungan yang demokratis antar sesama, menjadi individu yang mudah menyesuaikan diri, dan orang yang berpartisipasi aktif. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Ahmad Sanusi dalam Cholisin (2000: 1.17) diantaranya adalah membina masyarakat menurut syarat-syarat konstitusi untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, latihan berdemokrasi dan kepemimpinan. (Simorangkir, 2000: 1.18) yaitu memberikan pengetahuan tentang bangsa dan negara, meningkatkan kesadaran untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab serta mempersiapkan putra-putri bangsa menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Kemudian tujuan pendidikan kewarganegaraan juga dipertegas lagi oleh (Azis Wahab dan Sapriya, 2011: 315) bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan mengacu pada lampiran Permendiknas Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 adalah mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab, mengembangkan demokratis dan mengembangkan diri ke arah positif sehingga mampu berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia.

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah proses kegiatan untuk menciptakan warga negara yang mau melibatkan diri dan mempunyai keinginan kuat untuk memajukan bangsa ke arah positif berlandaskan kecintaan tanah air sesuai dengan aturan, konstitusi dan ideologi negara.

3. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Pelaksanakan ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana diatur dalam UU No.20/2003, Pemerintah menertibkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Nasional Pendidikan Ketentuan mengenai kurikulum yang diatur dalam PP No. 19/2009 (Wanda Rizky Febrianto, 2011) diantaranya adalah tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Dalam pasal 6 ditegaskan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :

- a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
- b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian .
- c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Kelompok mata pelajaran estetika.
- e. Kelompok mata pelajaran jasmani,olah raga,dan kesehatan.

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian di SD/MI/SLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket A, SMA/MA/SMAL/ Paket C, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui kegiatan agama, akhlak mulai kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya dan pendidikan jasmani. Hal ini diatur dalam PP No. 19/2005 adalah berkenaan dengan kedalaman muatan kurikulum. Dalam Aziz Wahab dan Sapriya (2011: 329-330) dituliskan cakupan Pendidikan Kewarganegaraan yang termuat dalam standar isi Pendidikan Kewarganegaraa di Permendiknas Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006, cakupan materi Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat,

Peraturanperaturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.

3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Persatuan dalam masya-rakat demokrasi.
7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini fokus pada implementasi nilai-nilai anti korupsi pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Untuk memperoleh gambaran sebagai perbandingan, Maka akan dilakukan kajian terhadap penelitian yang relevan, yaitu :

1. Judul Skripsi : “Implementasi Nilai- nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan AL-Islam oleh Luthfiyani Siswanti dan Aslich

Maulana di SMP Muhammadiyah 1 Gresik”. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gresik, Vol.9 No. 11 Tahun 2015.

Hasil penelitian menunjukkan: nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terkandung dalam kurikulum Pendidikan Al-Islam di SMP Muhammadiyah 1 Gresik adalah kejujuran, kedisiplinan, dan kerja keras. Implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran dilakukan dengan menekan nilai-nilai tersebut ketika menjelaskan muatan Pendidikan Al-Islam, memberikan wawasan terkait materi-materi antikorupsi kepada peserta didik di sela-sela materi pembelajaran sebagai pengantar yang bersifat hidden curriculum (kurikulum tersembunyi), sehingga termasuk di dalamnya adalah nilai keteladanan, sikap dan pembiasaan. Kendala dalam penelitian ini yakni cara menertibkan dan memahamkan peserta didik secara keseluruhan tentang pembelajaran yang 10 diajarkan dan solusinya guru harus memahamkan berkali-kali dan menyadarkan peserta didik yang bandel di kelas.

2. Judul Skripsi : Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Melalui Mata Pelajaran PPKn Di SMP Muhammadiyah 1 Medan. Oleh Sheilla Zihan Nadya Harahap (1502060002). Program studi pendidikan kewarganegaraan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah guru itu memiliki peranan dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Guru PPKn SMP Muhammadiyah 1 Medan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka, wawancara, dan angket. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah display data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa guru di SMP Muhammadiyah 1 Medan memiliki peran dalam menanamkan nilai anti korupsi melalui mata pelajaran PPKn. Dalam menanamkan nilai anti korupsi pada siswa, guru mengintegrasikan nilai-nilai luhur seperti nilai keadilan, kejujuran, keberanian, tanggung jawab, kepedulian, kesederhanaan,

kemandirian, dan yang terakhir kerja ke dalam keras ke dalam proses pembelajaran dan juga lingkungan serta peraturan sekolah. Kesuksesan dalam mengimplementasikan nilai anti korupsi di SMP Muhammadiyah 1 medan tidak lepas dari kebijakan Kepala Sekolah, Dewan Guru (khususnya guru PKn), dan seluruh warga sekolah, sehingga menanamkan nilai anti korupsi dapat berlangsung dengan baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama menekankan pada implementasi nilai anti korupsi di sekolah. Perbedaannya yaitu sasaran penelitian ini ialah peserta didik Sekolah Menengah Atas dan penelitian ini menggunakan teori nilai anti korupsi dari Bertens sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan, sasarannya ialah penelitian ini menggunakan teori nilai dari Noor Salimi dan Chabib.

3. Judul Skripsi : Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Universitas Muhammadiyah Makassar. Oleh Nur Syariah (105431101916) Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar Universitas Muhammadiyah Makassar. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan mengadakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain kemudian disimpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) pendidikan anti korupsi sudah ada dalam kurikulum dan sudah diimplementasikan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan namun masih ada beberapa dosen yang belum mengintegrasikan pemahaman anti korupsi dengan materi kuliah yang disajikan sehingga pembelajaran pendidikan anti korupsi ini tidak semua mahasiswa mengetahuinya atau mempelajarinya. (2) Hambatan Internal, segi kemampuan dosen mengimplementasikan pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran. Terkadang dosen merasa kewalahan banyaknya materi muatanyang ada, Hambatan Eksternal kemampuan mahasiswa memahami materi pembelajaran. Cara mahasiswa mengimplementasikan pendidikan anti korupsi itu agar dapat termotivasi dengan melakukan tindakan jujur baik dilingkungan kampus maupun diluar lingkungan kampus. Akan tetapi sebagian dari mahasiswa hanya melakukan nilai-nilai karakter didalam lingkungan kampus bahkan masih ada mahasiswa yang hanya mendengarkan ketika didalam kelas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama menekankan pada nilai anti korupsi. Perbedaannya yaitu sasaran penelitian ini ialah mahasiswa sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan peserta didik sekolah menengah atas.

4. Judul Skripsi : Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan. Oleh Saimah Sakilah Dalimunthe (033117304). Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk : mendeskripsikan : (1) Nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MAN 3 Medan. (2) Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MAN 3 Medan. (3) Hambatan penerapan nilai-

nilai pendidikan antikorupsi pelajaran Aqidah Akhlak di MAN 3 Medan. Subyek penelitian ini Kepala sekolah MAN 3 Medan, Wakil Kepala MAN 3 Medan, Guru Aqidah Akhlak Madrasah MAN 3 Medan, Wali Kelas, Tata Usaha MAN 3 Medan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah *display* data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Nilai Pendidikan Antikorupsi yang Terkandung pada mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MAN 3 Medan Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terkandung melalui mata pelajaran Aqidah Akhlak di MAN 3 Medan yaitu: nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai tanggung jawab dan amanah, nilai kerja keras, nilai ikhlas, nilai kesabaran. (2) Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran aqidah akhlak di MAN 3 Medan. Menetapkan langkah-langkah implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MAN 3 Medan. Menetapkan metode dalam proses penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MAN 3 Medan, Menetapkan tujuan penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi. (3) Hambatan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi di MAN 3 Medan. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Akidah Akhlak, Minimnya kesadaran dalam diri siswa tentang pentingnya nilai-nilai antikorupsi pada mata pelajaran Akidah Akhlak dalam membentuk perilaku antikorupsi. Keterbatasan fasilitas untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui tampilan drama di MAN 3 Medan. 2) Lingkungan keluarga yang kurang mendukung dalam hal libur sekolah (tidak masuk karena sakit tetapi kenyataan pergi bersama keluarga).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sama-sama menekankan pada pendidikan anti korupsi di sekolah. Perbedaannya yaitu sasaran penelitian ini ialah peserta didik MAN dan penelitian ini dilihat dari

perspektif agama Islam, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan, sasarannya ialah peserta didik Sekolah Menengah Atas dan tidak dilihat dari perspektif islam melainkan dilihat secara umumnya.